

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*

Zelly Alex Mahendra^{1*}, Charoline Cheisviyanny²

^{1,2}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: zellyalexmahendral2345@gmail.com

Abstract

This study examines the influence of political connections with the control variables of company size, debt equity ratio and profitability on audit fees for BUMN companies in Indonesia for the 2018-2022 period. The sample was determined by purposive sampling method and 32 BUMN companies were obtained as sample. The type of used is secondary data using multiple linear regression analysis. The results of the study are that political connections influence audit fees. The control variable company size has an effect on audit fees, while debt equity ratio and profitability have no effect on audit fees.

Keywords: *audit fee; control variables; political connection.*

How to cite

Mahendra, Z.A., & Cheisviyanny, C. (2023). Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(3), 312-326. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i3.30>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, kebutuhan terhadap informasi keuangan mengenai suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya laporan keuangan yang berguna bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan dimana mereka menginginkan adanya pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan agar informasi yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Laporan keuangan perusahaan diaudit bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pemakai laporan keuangan perusahaan serta menambah integritas laporan keuangan tersebut agar bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah dan lain-lain yang tercermin melalui opini yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Sebagai imbalan atas jasa audit laporan keuangan perusahaan yang telah diberikan, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada akuntan publik yang biasa disebut dengan biaya audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan PP N0. 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan sebagai revisi dari KEP.024/IAPI/VII/2008. Akan tetapi, biaya audit yang dibayarkan perusahaan masih sangat bervariasi, karena besarnya *audit fee* masih bergantung pada kesepakatan kantor akuntan publik dan kliennya

serta tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa audit tersebut. Fenomena mengenai *audit fee* terdapat pada perusahaan BUMN, dimana masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang tidak mengungkapkan besarnya *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan kepada akuntan publik kedalam laporan tahunan perusahaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan berani memanipulasi laporan keuangan perusahaan adalah perusahaan tersebut terlibat koneksi politik. Menurut Wicaksono (2017) koneksi politik merupakan suatu hubungan istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang bertujuan untuk memudahkan urusan perusahaan dan menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah. Hubungan istimewa yang dimaksud antara pemilik perusahaan dengan pemerintah adalah pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka baik sebagai anggota dewan di pemerintahan pusat dan daerah ataupun sebagai anggota partai politik (Wicaksono, 2017).

Perusahaan yang terhubung secara politik sering dianggap kuat karena mereka dapat memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari berbagai hak istimewa, termasuk meningkatkan posisi mereka dan mempengaruhi pendapatan perusahaan (Khan et al., 2016). Perusahaan dengan koneksi politik mendapat manfaat dari pengurangan pajak, kekuatan pasar yang lebih kecil dan lebih banyak peluang untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah (Wea, 2019). Selain itu, perusahaan yang terlibat koneksi politik sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dalam memperoleh pinjaman. Menurut Salehi (2020) terdapat berbagai cara mengidentifikasi keterlibatan politik dalam ekonomi dapat mempengaruhi transparansi keuangan. Pertama, perusahaan dengan koneksi politik dapat menekan informasi spesifik perusahaan untuk menyembunyikan aktivitas pengambil alihan oleh politisi dan kroninya. Kedua, politisi mengeksploitasi kontrol mereka atas kebijakan regulasi untuk mendukung kroni dengan imbalan suap, nepotisme, dan dukungan politik.

Koneksi politik sering kali muncul di negara-negara berkembang, ketika pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah diposisikan memiliki hubungan dengan pemerintah dan struktur organisasi perusahaan, termasuk komisaris dan direktur (Salehi,2020). Hal ini sering terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perusahaan-perusahaan BUMN beberapa kali mengisi dan mengganti komisaris perusahaan BUMN yang mempunyai hubungan dengan pemerintah dengan menunjuk komisaris perusahaan BUMN dari kalangan relawan atau anggota partai politik. Hal ini menunjukkan betapa luasnya fenomena koneksi politik dalam struktur organisasi BUMN di Indonesia.

Mengingat banyaknya perusahaan BUMN yang terlibat koneksi politik, presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan bahwa komisaris BUMN tidak boleh terlibat koneksi politik baik itu sebagai pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN. Akan tetapi kebijakan tersebut masih belum diterapkan oleh semua perusahaan BUMN di Indonesia, Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pimpinan perusahaan BUMN yang masih terlibat koneksi politik.

Perusahaan yang terlibat koneksi politik biasanya kurang transparan dalam menunjukkan hasil laporan keuangan perusahaan serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk dan cenderung membuat pernyataan yang salah (Salehi, 2020). Dengan mengukur besarnya usaha yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan proses audit, resiko audit dapat digunakan untuk menghitung besarnya *fee* yang harus dibayarkan oleh

perusahaan (Nurjanah & Sudaryati, 2019). Semakin tinggi resiko audit, maka semakin tinggi upaya yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang terlibat koneksi politik sehingga berdampak pada *audit fee* yang harus dibayar (Ariningrum & Diyanty, 2017 ; Nurjanah & Sudaryati, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris tentang pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*. Sebelumnya, penelitian pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee* telah dilakukan oleh Gul (2006) yang melakukan penelitian di Malaysia dan menemukan bahwa selama krisis keuangan biaya audit untuk perusahaan yang terlibat koneksi politik meningkat lebih banyak dari pada perusahaan yang terlibat koneksi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Primasari dan Sudarno (2013) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik membayar *audit fee* yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian Sarihartati et al., (2021) bahwa perusahaan yang terlibat koneksi politik memiliki resiko yang tinggi sehingga dapat meningkatkan upaya yang dilakukan oleh auditor sehingga menghasilkan biaya audit yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rina yuniarti et al., (2021) juga menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik mengeluarkan *audit fee* yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak terlibat koneksi politik. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan, *debt equity ratio* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol berdasarkan frekuensi penggunaan dan tingkat signifikansinya pada penelitian sebelumnya mengenai *audit fee*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan menggabungkan faktor-faktor yang lebih relevan terhadap *audit fee*. Penelitian mengenai *audit fee* merupakan topik yang menarik untuk diteliti, karena *audit fee* merupakan permasalahan yang dilematis bagi pihak auditor dan pihak perusahaan. Penelitian ini menambah kebaruan empiris pada pertumbuhan penelitian akuntansi keuangan yang berhubungan dengan *audit fee*. Penelitian ini sedikitnya memberikan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur penelitian audit dengan memberikan bukti baru tentang pengaruh dari koneksi politik terhadap *audit fee*. Kedua, penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, menambah kriteria untuk perusahaan yang terlibat koneksi politik dengan melihat informasi atau berita dari media sosial. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Audit Fee* (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Indonesia Tahun 2018-2022).

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah hubungan antara pihak yang mempunyai hak (principal) dan pihak yang mewakili hak tersebut (agent) melalui suatu kontrak yang disahkan oleh prinsipal dan agen (Rina yuniarti et al., 2021). Selain itu, Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa teori keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) untuk melakukan suatu layanan dan kemudian memberikan wewenang kepada agen tersebut untuk mengambil keputusan (Primasari dan Sudarno, 2013). Menurut teori keagenan, terdapat kontrak antara prinsipal dan agen, di mana agen mengelola bisnis dan uang yang diinvestasikan di dalamnya sebagai imbalan atas pemberian jasa agen kepada prinsipal.

Menurut teori agensi, setiap orang bertindak demi kepentingan diri sendiri. Konflik keagenan muncul dari adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yang sama-

sama mencari keuntungan terbesar (Simanjuntak & Prabowo, 2021). Prinsipal mencari keuntungan sebesar-besarnya atas modal yang ditanamkan, sedangkan agen meminta pembayaran atas pekerjaannya dalam bentuk gaji, bonus, dan tunjangan (Novrilia et al., 2019).

Adanya konflik kepentingan antara principal dan agent mungkin diperlukan untuk menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sebagai landasan pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manajemen mengutamakan kepentingan pemilik dan tidak hanya bekerja untuk tujuannya sendiri. Selain itu, tugas agen adalah memberi tahu prinsipal tentang keadaan bisnisnya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ini. Akuntan publik independen dapat berperan sebagai mediator antara prinsipal dan agen guna memastikan kebenaran laporan keuangan yang disajikan agen. Mengurangi kemungkinan asimetri informasi adalah tujuannya yaitu untuk mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan manajemen serta memverifikasi laporan keuangan maka dapat menugaskan pihak ketiga yang independen yaitu auditor eksternal (Nastiti & Rahayu, 2018 ; Tat & Murdiawati, 2020).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik seringkali memakai jasa KAP *big four* untuk mengaudit laporan keuangan mereka dalam upaya untuk meyakinkan *principal*. Karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa KAP *big four* akan menghasilkan audit berkaliber tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor KAP *big four* mempunyai pengalaman lebih banyak, lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan auditor pada KAP kecil (Immanuel & Yuyetta, 2018). Besarnya biaya audit akan bergantung pada apakah KAP *big four* tersebut diggunakan untuk melakukan jasa audit atas laporan keuangan.

Audit Fee

Menurut Cristansy dan Ardiati (2018) biaya audit adalah jenis pembayaran yang diterima auditor dan pelanggannya sebagai penggantian atas jasa audit yang mereka berikan. Biaya audit menurut Tee et al. (2017) pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung pada beberapa faktor dalam penugasan audit, antara lain ukuran perusahaan klien (*client size*), kompleksitas audit yang dihadapi auditor (*audit complexity*), jumlah risiko audit yang akan dihadapi auditor (*audit risk*), reputasi kantor akuntan publik yang akan melakukan audit (*The Big 4 Auditors*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya audit adalah pengeluaran atau ketidakseimbangan yang dilakukan oleh klien sebagai imbalan atas pemberian jasa audit oleh akuntan publik

Menurut penelitian Dinie Setyawati (2019), total *audit fee* adalah total seluruh pembayaran yang dilakukan kepada auditor. Terdapat dua jenis *audit fee* yaitu *audit fee* dan *non audit fee*. *Audit fee* merupakan jumlah keseluruhan yang dibayarkan kepada auditor untuk jasa audit, sedangkan *non audit fee* merupakan biaya atas jasa selain dari *audit fee*. Dalam penelitiannya, menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus diungkapkan oleh manajemen mengenai hasil pekerjaan laporan audit dan laporan tersebut disepakati berdasarkan kontrak kerja sebelum memulai proses audit, timbal balik audit, maka kemungkinan besar akan terjadi timbal balik yang akan mereduksi kualitas laporan audit.

Di Indonesia sendiri Krisnawan (2018) menyebutkan bahwa panduan terkait penetapan imbalan jasa atau *audit fee* ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum IAPI No. KEP,024/IAPI/2008. dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penentuan dalam imbalan jasa terdiri atas 3 tahap yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan palaporan audit. Sedangkan dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang “penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan” berisi tentang metode penentuan keseluruhan imbalan jasa. Seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang berprofesi sebagai akuntan publik

hendaknya menggunakan aturan ini sebagai acuan ketika menilai seberapa besar ketidakseimbangan yang wajar untuk memungkinkan jasa ahli yang mereka tawarkan.

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan hubungan istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang bertujuan untuk memudahkan urusan perusahaan dan menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah (Wicaksono, 2017). Butje dan Tjondro (2014) menegaskan bahwa untuk menciptakan strategi bersaing, dunia usaha harus mampu mencari dan memanfaatkan kemungkinan- kemungkinan yang ada di pasar, salah satunya melalui koneksi politik. Perusahaan yang memiliki hubungan politik adalah perusahaan yang ingin lebih dekat dengan politisi atau pemerintah melalui cara tertentu (Marfuah, 2015).

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah adalah perusahaan yang terlibat koneksi politik. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki perlindungan hak milik lemah sehingga koneksi politik sering terjadi. Koneksi politik di Indonesia merupakan hal yang umum, karena menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah kedalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris perusahaan maupun direksi perusahaan dan hal ini sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti yang kita lihat pada awal pemerintahan Joko Widodo dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Sebuah perusahaan yang terlibat koneksi politik erat kaitannya dengan suatu komunikasi dan hubungan yang bermaksud untuk mempermudah kepentingan perusahaan. Salah satu unsur peranan yang ada dalam politik adalah budaya politik, komunikasi politik dan sistem politik. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Koneksi Politik dengan *Audit Fee*

Menurut Salehi (2020) hubungan politik perusahaan merupakan penentu utama profitabilitas utama sebuah perusahaan di negara berkembang. Dia percaya bahwa keputusan pemerintah sangat mempengaruhi perusahaan yang memiliki keterlibatan koneksi politik. Perusahaan yang terlibat koneksi politik dapat disebut perusahaan tersebut memiliki afiliasi dengan kekuasaan politik dan mencoba untuk menjalin hubungan yang akrab dengan pemerintah (Rina yuniarti et al. 2021). Hubungan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah sehingga dapat melancarkan aktivitas bisnisnya. Keuntungan tersebut seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, kemudahan dalam memperoleh bisnisnya dan lain sebagainya.

Pemahaman mengenai isu koneksi politik dengan perusahaan didasarkan pada perspektif teori keagenan mengenai interaksi keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa organisasi bersedia memberikan kompensasi yang tinggi kepada auditor eksternal untuk mengelola proyek yang berisiko lebih tinggi. karena bisnis yang memiliki koneksi politik dianggap oleh auditor eksternal memiliki aktivitas kecurangan yang lebih tinggi. Pendapat ini berasal dari fakta bahwa bisnis yang memiliki ikatan politik biasanya memberikan laporan keuangan yang tidak jelas, sehingga lebih sulit bagi auditor untuk mereview laporan keuangan karena meningkatnya kemungkinan kesalahan. Semakin banyak auditor bekerja untuk mendapatkan sampel audit maka semakin tinggi pula risikonya sehingga berpengaruh terhadap biaya audit yang di bayarkan oleh perusahaan juga semakin meningkat.

Konflik keagenan timbul karena prinsipal perusahaan tidak terlibat aktif dalam

administrasi perusahaan. Agen biasanya menerima kekuasaan dan kewajiban dari prinsipal untuk menjalankan bisnis atas nama pemilik dan demi kepentingan terbaik pemilik (Wulandari, 2018). Manajemen akan menghadapi permasalahan sulit yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal saat menjalankan kewajibannya. Karena akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam aliansi dalam suatu korporasi yang mempunyai hubungan politik, maka permasalahan ini akan menjadi semakin kompleks. Hasilnya, teori keagenan dipandang mampu menjelaskan konflik antara pemegang saham dan manajemen, khususnya pada bisnis yang dewan direksi dan komisarisnya memiliki ikatan politik (Wea, 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rina yuniarti et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat koneksi politik membayarkan biaya audit yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salehi, 2020) juga menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik mempunyai kinerja lebih rendah 37% jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terlibat koneksi politik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ariningrum dan Diyanty (2017), Primasari dan Sudarno (2013), Tee (2018), Wea (2019) juga menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Audit fee*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia tahun 2018-2022. Perusahaan BUMN digunakan pada penelitian ini karena perusahaan BUMN lebih rentan terlibat koneksi politik karena dapat dilihat dari komisaris/direktur perusahaan BUMN rata-rata memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Selain itu peneliti yang menggunakan perusahaan BUMN sebagai populasi penelitian pada variabel koneksi politik dan *audit fee* juga jarang dilakukan.

Pengumpulan data penelitian dengan teknik dokumentasi melalui *website* resmi masing-masing perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan *literature* dari buku, jurnal, skripsi terdahulu serta memanfaatkan sumber yang relevan dengan topik penelitian ini seperti informasi biografi yang bersumber dari artikel di internet. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1
Kriteria Sampel Penelitian

N	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan BUMN yang ada di Indonesia	64
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i>	(7)
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan <i>audit fee</i> dalam <i>annual report</i>	(11)
4	Perusahaan BUMN dengan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2018-2022 yang tidak lengkap	(14)
jumlah sampel		32
Periode		5
jumlah		160

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *audit fee*. Variabel *audit fee* pada penelitian ini diukur menggunakan Logaritma Natural dari besarnya *audit fee* yang tertera dalam laporan tahunan perusahaan (Nurjanah dan Sudaryati, 2019). Dengan

menggunakan data yang diambil dari perusahaan BUMN yang ada di Indonesia tahun 2018-2022. Variabel *audit fee* dalam penelitian ini diberi simbol LNAF. Berikut rumus untuk menghitung *audit fee*:

$$LNAF = LN (\text{Audit Fee})$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Dalam penelitian ini koneksi politik diukur menggunakan variabel *dummy*, apabila perusahaan tersebut terlibat koneksi politik diberi nilai 1 sedangkan apabila perusahaan tersebut tidak terlibat koneksi politik diberi nilai 0. Berikut kriteria dalam menentukan perusahaan terlibat koneksi politik: (1) Salah satu pemegang saham minimal 10% merupakan seorang menteri atau mantan menteri, anggota parlemen dan mantan anggota parlemen, (2) Minimal salah satu dari board of directors dan board of commissioner merangkap jabatan, baik itu sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, rangkap jabatan sebagai pejabat militer, mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer, (3) Perusahaan yang menjelaskan profil dewan komisaris dan direksinya adalah mantan atau kepala daerah saat ini, mantan atau anggota politisi, mantan atau anggota TNI, mantan atau anggota menteri selama masa penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: Ukuran Perusahaan (*SIZE*), *Debt Equity Ratio* (*DER*), Profitabilitas (*ROA*).

Pada penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan *software Stastical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 24. Setelah melakukan analisis regresi linear berganda, selanjutnya beberapa pengujian dilakukan, yaitu: uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk menguji ketetapan model dan uji statistik parameter individual (uji statistik t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$LNAF = \alpha + \beta_1 KPOL + \beta_2 SIZE + \beta_3 DER + \beta_4 ROA + e$$

Keterangan :

LNAF	= <i>Audit fee</i>
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Regresi
<i>KPOL</i>	= Koneksi Politik
<i>SIZE</i>	= Ukuran Perusahaan
<i>DER</i>	= <i>Debt Equity Ratio</i>
<i>ROA</i>	= Profitabilitas
<i>e</i>	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel dibawah ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif secara keseluruhan untuk masing-masing variabel yang peneliti gunakan. Statistik deskriptif tersebut terdiriatas:

Tabel 2

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
oneksi politik	160	0	2	1.31	.802
SIZE	160	26.87	39.67	31.722	2.33851
DER	160	-6.55	26.50	3.4186	4.48540
ROA	160	-.62	.62	.0203	0.8790
audit Fee	160	18.78	24.98	21.5583	1.47317

Pada tabel 2 memperlihatkan hasil analisis statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata LNAF untuk 5 tahun sebesar 21.5583. Nilai *maksimum* sebesar 39.67, nilai *minimum* sebesar 18.78. Variasi dari variabel LNAF dijelaskan dengan nilai standar deviasi sebesar 1.47317. Hasil analisis statistik deskriptif KPOL dengan menggunakan variabel *dummy*, maka nilai terendah yang diperoleh sebesar 0 dan nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 2 dengan nilai rata-rata KPOL sebesar 1.31 dan nilai standar deviasi sebesar 0.802. Sedangkan variabel kontrol *SIZE* memiliki nilai rata-rata sebesar 31.7222, nilai *maksimum* sebesar 39.67, nilai *minimum* sebesar 26.87 Dengan nilai standar deviasi sebesar 2.33851. Sedangkan nilai rata-rata DER sebesar 3.4186, nilai *maksimum* sebesar 26.50, dan nilai *minimum* sebesar -6.55. Dengan nilai standar deviasi sebesar 4.48540. Dan nilai rata-rata ROA sebesar 0.0203, nilai *maksimum* sebesar 0.62, nilai *minimum* sebesar -0.62. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0.08790.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
√			160
Normal Parameters,a,b	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.96531553
Most Extreme Differences	Absolute		.048
	Positive		.048
	Negative		-.039
Test Statistic			.048
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200c,d
√	60		
Normal Parameters,a,b	Mean	.0000000	Normal
	Std. Deviation		Parameters,a,b
		.96531553	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai assymp. Sig (2 – tailed) adalah sebesar 0.200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.200 > 0.05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas data.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4
Uji MultiokolonieritasCoefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Koneksi politik	.918	1.089
	SIZE	.893	1.119
	DER	.983	1.017
	ROA	.958	1.044

Dependent Variable: Audit Fee

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Pada uji multikolonieritas dikatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas apabila nilai $VIF < 10$. Berdasarkan hasil pada tabel 4 variabel independen yaitu KPOL serta variabel kontrol SIZE, DER dan ROA memiliki nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
.Constant)	-1.071	.643			-1.665	.098
Koneksi politik	-.060	.059	-.077		-1.014	.312
SIZE	.065	.021	.240		3.135	.401
DER	-.050	.010	-.356		-4.869	.272
ROA	.029	.530	.004		.055	.365

Dependent Variable: ABRESID

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glesjer. Apabila nilai sig < 0.05 maka terdapat heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai sig nya > 0.05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai sig dari beberapa variabel dalam penelitian ini > 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Auto Korelasi

Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji auto korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji durbin Watson dengan kriteria sebagai berikut: (1) Angka DW < -2 menunjukkan adanya auto korelasi positif, (2) Angka DW diantara -2 hingga 2 menunjukkan tidak terdapat auto korelasi, (3) Angka DW > 2 menunjukkan adanya auto korelasi negatif. Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai durbin Watson 0.386 yang terletak diantara -2 hingga +2 (-2 < 0.662 < +2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat auto korelasi dalam model penelitian ini.

Tabel 6
Uji Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 ^a	.571	.560	.97769	.662

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Beta		
	B	Std. Error					
Constant)	7.036	1.095				6.426	.000
Koneksi Politik	.242	.101	.132			2.397	.018
SIZE	.449	.035	.713			12.803	.000
DER	-.015	.017	-.047			-0.881	.380
ROA	.575	.901	.034			.638	.525

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta berapa besar pengaruhnya. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS 24. Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian dengan metode analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$LNAF = 7.036 + 0,242 + 0,449 - 0,015 + 0.575$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
	.433 ^a	.188		.167	.57442

a. Predictors: (Constant), ROA, Koneksi politik, SIZE, DER

b. Dependent Variable: ABRESID

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model yang digunakan pada penelitian untuk mengukur variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai r square adalah 0,188. Data tersebut menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel independen yaitu koneksi politik dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *audit fee* adalah sebesar 18.8%. Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 81.2% ditentukan oleh variabel-variabel lain diluar darimodel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (F-test)

Tabel 9
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11.810	4	2.952	8.948	.000 ^b
Residual	51.143	155	.330		
Total	62.953	159			

nt Variable: Audit Fee

d. Predictors: (Constant), ROA, Koneksi politik, SIZE, DER

Uji statistic F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan kriteria yaitu jika nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel indpenden secara bersama- sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test)

Tabel 10
Uji tCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	7.036	1.095		6.426	.000
Koneksi Politik	.242	.101	.132	2.397	.018
SIZE	.449	.035	.713	12.803	.000
DER	-.015	.017	-.047	-.881	.380
ROA	.575	.901	.034	.638	.525

a. Dependent Variable: Audit Fee

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu koneksi politik, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, debt equity ratio dan profitabilitas terhadap *audit fee*. Berdasarkan pada tabel 10, nilai signifikansi variabel koneksi politik sebesar 0.018, dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0.018 < 0.05$) serta nilai t-hitung sebesar 2.397. Data tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik secara parsial berpengaruh terhadap *audit fee*.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel koneksi politik adalah sebesar 0,018 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0,018 < 0.05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *audit fee*. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis 1 yang menyatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee* pada perusahaan BUMN yang ada di Indonesia periode 2018-2022 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wea (2019) dan Ariningrum & Diyanty (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *audit fee*. Dalam penelitiannya menjelaskan adanya hubungan politik dalam perusahaan diyakini akan meningkatkan resiko yang melekat pada perusahaan, hal tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas *rent-seeking* pada perusahaan-perusahaan yang terlibat koneksi politik. Kegiatan *rent-seeking* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para politisi dalam perusahaan dengan cara melakukan lobi kepada pihak yang berwenang untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan.

Koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik membayar lebih untuk jasa audit dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Bisnis yang memiliki hubungan politik lebih besar kemungkinannya untuk gagal dan memberikan risiko audit yang lebih besar, sehingga mengakibatkan pembayaran biaya audit yang lebih besar. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya menunjukkan transparansi yang lebih rendah ketika menyajikan hasil laporan, menghasilkan laporan keuangan di bawah standar, dan sering mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, itulah sebabnya perusahaan-perusahaan tersebut membayar biaya audit yang lebih tinggi (Salehi, 2020). Karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan lebih besar ketika suatu perusahaan

mempunyai transparansi yang terbatas, maka auditor harus bekerja lebih keras untuk menelaah laporan keuangan organisasi agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat terdeteksi.

Oleh karena itu, temuan pada penelitian ini memberikan kepercayaan terhadap anggapan teori keagenan bahwa bisnis yang memiliki ikatan politik akan lebih cenderung membayar biaya audit lebih besar kepada auditor eksternal untuk mengelola eksposur mereka terhadap audit yang berisiko lebih tinggi. Karena bisnis yang memiliki ikatan politik dianggap oleh auditor eksternal memiliki aktivitas kecurangan yang lebih tinggi. Pendapat ini didukung oleh pengamatan bahwa perusahaan yang memiliki ikatan politik kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai status keuangannya, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah biaya audit yang mereka bayarkan dalam laporan tahunannya

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan Variabel koneksi politik yang diprosikan KPOL berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan BUMN yang ada di Indonesia periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar *audit fee* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak terlibat koneksi politik. Penyebab perusahaan yang terlibat koneksi politik membayar *audit fee* lebih tinggi karena perusahaan yang terlibat koneksi politik biasanya kurang transparan dalam menunjukkan hasil laporan keuangan perusahaan serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk dan cenderung membuat pernyataan yang salah. Ketika tingkat transparansi perusahaan rendah auditor memerlukan banyak usaha untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan karena risikonya kesalahannya lebih tinggi. Karena semakin tinggi resiko perusahaan, maka semakin banyak usaha yang dilakukan auditor untuk mendapatkan sampel audit maka imbalan jasa audit juga semakin tinggi. Selain itu perusahaan yang memiliki koneksi politik juga dapat meningkatkan resiko bisnis, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar dari auditor selama proses audit, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat terdeteksi.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai antara lain: (1) Masih banyaknya perusahaan BUMN yang belum memposting laporan tahunan secara lengkap pada website resmi perusahaan, (2) Masih banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mengungkapkan besaran *audit fee* kedalam annual report yang mengakibatkan dikeluarkannya dari sampel penelitian.

Saran Penelitian

Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan penggunaan pengukuran atau proksi lain untuk dapat mengetahui hal yang berdampak dalam penentuan *audit fee*, serta memakai periode yang bervariasi sehingga temuan-temuan yang didapatkan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai situasi yang sebenarnya. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain untuk mengukur tingkat koneksi politik dalam perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi *audit fee* yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti: komite audit, *Good Corporate Governace* (GCG) dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningrum, I., & Diyanty, V. (2017). . The Impact of Political Connections and the Effectiveness of Board of Commissioner and Audit Committees on Audit Fees. *Business and Finance Journal*, 11(4), 53–70.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 2–10.
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Modus*, 30(2), 198–211.
- Dinie Setyawati, R. N. N. A. (2019). Positive Abnormal Audit Fee dan Koneksi Politik Terhadap Kualitas Audit. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 11(2), 271–278.
- Flafiana Sarihartati Agun, Grahita Chandrarin, dan P. (2021). Koneksi Politik, Corporate Governance, dan Biaya Audit di Indonesia. *Accounting and Financial Review*, 4(1), 155–164.
- Gul, F. A. (2006). Auditors' response to political connections and cronyism in Malaysia. *Journal of Accounting Research*, 44(5), 931–963.
- Immanuel, R., & Yuyetta, E. N. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Audit Fees (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 816–827.
- Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4).
- Nastiti, S. D., & Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Dan Anak Perusahaan Terhadap Penetapan Audit Fee Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(10).
- Novrilia, H., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit. *Eksplorasi, Jurnal Akuntansi*, 1(1), 256–276.
- Nurjanah, F., & Sudaryati, E. (2019). The Effect of Political Connection and Effectiveness of Audit Committee on Audit Fee. *The Indonesian Accounting Review*, 9(2), 227–234.
- Primasari, R., & Sudarno. (2013). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359.
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan pada Kesingkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen Universitas Gajah Mada*.
- Rina yuniarti, pedi riswandi, M. F. (2021). Analisis koneksi politik dan gender diversity terhadap audit fee. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 133–142.
- Salehi, M. (2020). The relationship between the companies' political connections and audit fees. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1123–1141. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0066>
- Simanjuntak, S. S. D., & Prabowo, T. J. W. (2021). Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–8.
- Tat, R. N. E., & Murdiawati, D. (2020). Faktor-faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal (Audit Fee) pada Perusahaan Non-Keuangan. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(1), 177–195.
- Tee, C. M. (2018). Family firms, political connections and audit fees: evidence from Malaysian firms. *Managerial Auditing Journal*, 33(6), 613–632.
- Tee, C. M., Gul, F. A., Foo, Y. B., & Teh, C. G. (2017). Institutional Monitoring, Political Connections and Audit Fees: Evidence from Malaysian Firms. *International Journal of Auditing*, 21(2), 164–176. <https://doi.org/10.1111/ijau.12086>

- Wea, A. N. S. (2019). Political connection, CEO gender, internal audit, corporate complexity and audit fee in go public companies in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Wicaksono, A. P. (2017). (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180.